



Article Informations

Corresponding Email:

faiz.muhammadhasbullah@gmail.com

Received: 06/08/2025; Accepted:

11/01/2026; Published: 26/02/2026

## **STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK DALAM MENDORONG INVESTASI DI KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TAHUN 2019–2024**

**Muhammad Faiz Hasbullah**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam mendorong investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dari Republik Rakyat Tiongkok ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019–2024. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kerangka empat tahapan dari Kishan S. Rana-economic salesmanship, networking, image building, dan regulation management-artikel ini menganalisis bagaimana Indonesia mengintegrasikan upaya promosi yang dipimpin negara, kemitraan kelembagaan, narasi investasi, serta reformasi regulasi untuk menarik modal Tiongkok. Temuan penelitian menunjukkan realisasi investasi konkret oleh empat perusahaan asal Tiongkok di KITB, yang didukung oleh status sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), keberadaan forum kerja sama bilateral (HDCM dan JCBC), serta mekanisme perizinan yang terintegrasi melalui sistem OSS-RBA. Artikel ini menegaskan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia memainkan peran penting dalam menyelaraskan kepentingan nasional dengan dinamika ekonomi global, sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi negara.

**Kata Kunci:** Diplomasi Ekonomi, Investasi, Indonesia, Tiongkok, Kawasan Industri Terpadu Batang

### **Abstract**

*This study explores Indonesia's economic diplomacy strategy in promoting foreign direct investment (FDI) from the People's Republic of China into the Batang Integrated Industrial Zone (KITB) during President Joko Widodo's 2019–2024 administration. Using a qualitative descriptive approach and Kishan S. Rana's four-stage framework-economic salesmanship, networking, image building, and regulation management-this article analyzes how Indonesia integrated state-led promotional efforts, institutional partnerships, investment narratives, and regulatory reforms to attract Chinese capital. The findings highlight concrete investment realization by four Chinese companies in KITB, supported by national strategic project status, bilateral cooperation forums (HDCM and JCBC), and harmonized licensing mechanisms such as OSS-RBA. This article demonstrates that Indonesia's economic diplomacy has played a critical role in*

*aligning national interests with global economic dynamics while reinforcing its economic sovereignty.*

**Keywords:** *Economic Diplomacy, Investment, Indonesia, China, Batang Integrated Industrial Zone*

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat perekonomian nasional melalui optimalisasi diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen utama kebijakan luar negeri. Dinamika globalisasi, meningkatnya persaingan antarnegara dalam menarik investasi, serta kebutuhan untuk mempercepat industrialisasi domestik, telah menempatkan diplomasi ekonomi pada posisi yang sangat strategis dalam perumusan politik luar negeri Indonesia. Terlebih lagi, di tengah tekanan global pasca-pandemi, disrupsi rantai pasok internasional, serta tren dekarbonisasi global, Indonesia dihadapkan pada tantangan dan peluang yang kompleks dalam membangun daya saing ekonominya di kancah internasional.

Dalam konteks tersebut, Presiden Joko Widodo sejak awal masa pemerintahannya pada 2014 telah mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia agar lebih proaktif dalam mendukung kepentingan ekonomi nasional. Transformasi arah kebijakan luar negeri ini terlihat dari penekanan terhadap kerja sama strategis yang berorientasi pada hasil konkret, khususnya dalam sektor investasi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur. Salah satu realisasi dari pendekatan ini adalah pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Proyek ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas industri nasional, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menjaring Foreign Direct Investment (FDI) yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan.

KIT Batang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2022, dan diproyeksikan menjadi kawasan industri masa depan yang mengedepankan

konsep *smart* dan *sustainable industrial estate* (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023). Dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa pengembangan KITB bukan hanya proyek pembangunan biasa, melainkan bagian dari agenda besar transformasi ekonomi nasional. Kawasan ini dilengkapi dengan infrastruktur penunjang seperti akses jalan tol Trans-Jawa, rel kereta api, dan pelabuhan yang mempermudah logistik dan distribusi barang. Pemerintah juga memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal yang kompetitif kepada investor asing yang ingin menanamkan modal di kawasan ini.

Posisi strategis KITB dalam rantai pasok nasional dan regional diperkuat dengan keterlibatannya dalam proyek kerja sama internasional, salah satunya adalah kemitraan ekonomi dengan Republik Rakyat Tiongkok. Dalam periode 2019–2024, Tiongkok menempati peringkat kedua sebagai negara asal investasi asing terbesar di Indonesia, dengan total nilai investasi mencapai USD34,19 miliar, atau sekitar 18% dari keseluruhan PMA di Indonesia (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2024). Hubungan ekonomi Indonesia–Tiongkok diperkuat oleh implementasi Belt and Road Initiative (BRI), sebuah inisiatif strategis dari Tiongkok yang bertujuan memperkuat konektivitas ekonomi lintas kawasan, khususnya di Asia dan Afrika. Bagi Indonesia, partisipasi dalam BRI mencerminkan langkah pragmatis dalam memanfaatkan momentum global untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur nasional (Erba, 2024).

KIT Batang menjadi salah satu contoh konkret dari realisasi BRI di Indonesia. Beberapa perusahaan asal Tiongkok telah merealisasikan investasinya di kawasan ini. Misalnya, PT Wanxinda Group mengembangkan lahan seluas 98 hektare dengan nilai investasi mencapai Rp1 triliun, dan diproyeksikan membuka sekitar 1 juta lapangan kerja, dengan komposisi pekerja lokal mencapai 99% (Tempo, 2023). Selain itu, dua perusahaan lainnya yakni PT Sumber Sukses Machinery (SSM) dan PT Xiang Jiang Indonesia juga telah menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Tanah

Industri (PPTI) dengan total nilai investasi mencapai Rp900 miliar (Setiawan, 2024). Keterlibatan aktif perusahaan-perusahaan Tiongkok ini menunjukkan bahwa strategi diplomasi ekonomi Indonesia telah berhasil menarik minat investor strategis yang mampu mendukung pertumbuhan sektor industri nasional.

Namun demikian, kerja sama ekonomi dengan Tiongkok juga memunculkan berbagai tantangan. Meskipun memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, ketergantungan terhadap modal asing dapat menciptakan kerentanan struktural, termasuk potensi intervensi kepentingan asing dalam kebijakan ekonomi nasional (Rivai et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi diplomasi ekonomi yang matang dan terstruktur, yang tidak hanya mengejar volume investasi, tetapi juga memastikan kualitas, keberlanjutan, dan kedaulatan dalam setiap bentuk kerja sama yang dijalankan (Delanova et al., 2018). Strategi ini harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, transparansi, dan kepastian hukum, agar Indonesia dapat mempertahankan kendali atas arah pembangunan nasionalnya.

Sebagai instrumen kebijakan luar negeri, diplomasi ekonomi memiliki fungsi ganda: sebagai alat untuk memperkuat posisi Indonesia di arena internasional, dan sebagai sarana untuk membangun daya saing ekonomi domestik. Melalui strategi promosi, negosiasi, dan kerja sama kelembagaan, diplomasi ekonomi berperan dalam membangun kepercayaan investor dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat. Dalam konteks KIT Batang, diplomasi ekonomi tidak hanya ditujukan untuk menarik modal, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan narasi pembangunan berkelanjutan, penguatan UMKM lokal, serta pengembangan sumber daya manusia berbasis industri (Arum & Suryadipira, 2021).

Kajian ini menggunakan kerangka empat tahapan diplomasi ekonomi dari Kishan S. Rana, yang meliputi: (1) *economic salesmanship*, yaitu promosi potensi ekonomi oleh aktor negara; (2) *networking*, yaitu pembangunan jejaring antara pemangku kepentingan; (3) *image building*, yaitu pencitraan

Indonesia sebagai destinasi investasi yang stabil dan kompetitif; serta (4) *regulation management*, yaitu reformasi dan harmonisasi kebijakan untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor (Rana, 2011). Kerangka ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap strategi Indonesia dalam menarik investasi Tiongkok ke KITB, sekaligus menilai efektivitas pendekatan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada teori Neoliberal Institusionalisme, yang menekankan pentingnya peran institusi, kerja sama antarnegara, dan kepastian aturan dalam menciptakan stabilitas ekonomi internasional (Lamy, 2011). Teori ini relevan karena dalam konteks investasi asing, institusi seperti BKPM, HDCM (High-Level Dialogue and Cooperation Mechanism), serta berbagai forum bilateral memainkan peran sentral dalam membentuk ekosistem kerja sama yang berkelanjutan (Dugis, 2016). Selain itu, pendekatan ini menegaskan bahwa kerja sama internasional dapat memberikan *absolute gains* bagi negara-negara yang terlibat, selama terdapat kepatuhan terhadap norma dan kesepakatan bersama.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting secara akademik untuk memperkaya diskursus mengenai diplomasi ekonomi Indonesia, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan global. Melalui studi kasus KIT Batang, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menjalin kemitraan investasi dengan Tiongkok, sekaligus memberikan rekomendasi untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi unggulan di kawasan Asia Tenggara.

## **2. PEMBAHASAN**

### ***Economic Salesmanship: Peran Promosi Tingkat Tinggi dalam Menarik Investasi***

Promosi investasi atau *economic salesmanship* merupakan landasan awal dalam strategi diplomasi ekonomi yang menitikberatkan pada promosi aktif oleh aktor-aktor kunci negara. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo berperan sebagai ujung tombak utama promosi potensi ekonomi Indonesia, termasuk Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Dalam berbagai forum ekonomi internasional dan kunjungan bilateral, Presiden Jokowi secara langsung menyampaikan pesan mengenai kesiapan Indonesia dalam menyambut investasi berkualitas, serta memperkenalkan KITB sebagai model kawasan industri masa depan. Dalam kunjungannya ke Tiongkok pada Oktober 2023, misalnya, Jokowi mempresentasikan KITB sebagai kawasan industri hijau yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional dan didukung penuh oleh pemerintah pusat (Tempo, 2023).

Dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi, Jokowi selalu menekankan bahwa Indonesia tidak hanya menawarkan lahan, tetapi juga jaminan keamanan hukum, reformasi regulasi, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan kemudahan administrasi, termasuk pemangkasan birokrasi melalui sistem OSS-RBA. Presiden secara eksplisit menyebut KITB sebagai bagian dari komitmen nasional dalam memperkuat industrialisasi dan memperluas basis manufaktur berorientasi ekspor. Pendekatan ini menciptakan *branding* yang kuat di benak investor asing, terutama dari Tiongkok yang melihat KITB sebagai destinasi strategis untuk ekspansi kawasan Asia Tenggara.

Promosi yang dilakukan Presiden turut diperkuat oleh jajaran kementerian terkait seperti Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Mereka aktif dalam menjalin komunikasi langsung dengan calon investor, termasuk melalui kegiatan *roadshow*, presentasi proyek, forum dagang, hingga negosiasi insentif khusus. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa strategi promosi tidak dilakukan secara sporadis, melainkan terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah. Di sisi lain, keterlibatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan KADIN juga turut berperan dalam menyampaikan narasi bahwa KITB adalah representasi kebijakan

industrialisasi Indonesia yang modern dan terbuka terhadap kerja sama internasional.

Dampak dari strategi *salesmanship* ini dapat terlihat secara konkret dalam bentuk realisasi investasi. Sebanyak empat perusahaan asal Tiongkok telah menandatangani perjanjian investasi di KITB, yaitu PT Wanxinda Batang Industry Land Investment, PT Wanxinda Green Travel Industry Development, PT Xiang Jiang Group Indonesia, dan PT Sumber Sukses Machinery (SSM). Total komitmen investasi dari perusahaan-perusahaan ini mencapai lebih dari Rp1 triliun (Setiawan, 2024). PT Wanxinda sendiri berencana mengembangkan lahan seluas 98 hektare dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak satu juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa strategi promosi tingkat tinggi yang dilakukan secara menyeluruh sangat efektif dalam menarik minat investor strategis.

Keberhasilan strategi *economic salesmanship* dalam konteks KITB juga memperlihatkan bahwa promosi tidak cukup hanya mengandalkan potensi ekonomi, tetapi juga harus dikemas dalam bentuk narasi pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia menempatkan KITB sebagai simbol modernisasi ekonomi dan transformasi industri, bukan sekadar proyek kawasan. Hal ini sejalan dengan pendekatan *nation branding* yang mengintegrasikan diplomasi ekonomi dengan agenda pembangunan nasional. Dalam konteks hubungan Indonesia–Tiongkok, pendekatan ini memperkuat persepsi positif terhadap stabilitas politik dan komitmen pemerintah dalam menjamin keberlanjutan investasi.

**Networking: Penguatan Forum Kelembagaan dan Peran Perwakilan Diplomatik**

Tahap kedua dalam strategi diplomasi ekonomi Indonesia adalah penguatan jejaring kelembagaan atau *networking*, yang melibatkan institusi negara dan forum bilateral sebagai medium interaksi yang berkelanjutan. Dalam hubungan Indonesia-Tiongkok, dua forum utama yang memainkan peran penting adalah Joint Commission on Bilateral Cooperation (JCBC) dan High-Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM). Forum ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi wadah konkret bagi kedua negara untuk membahas proyek strategis, menyelesaikan hambatan investasi, serta memperkuat sinergi antar instansi teknis. Kehadiran pejabat tinggi dari kedua negara di forum ini memperlihatkan keseriusan diplomatik dalam mengawal kerja sama ekonomi.

HDCM secara khusus menjadi arena penting dalam koordinasi lintas sektor, termasuk sektor manufaktur, energi, dan pengembangan kawasan industri seperti KITB. Dalam pertemuan HDCM kedua yang digelar di Bali pada 9 Juli 2022, State Councilor dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan membahas dukungan Tiongkok terhadap PSN Indonesia, termasuk kerja sama teknologi dan rantai pasok industri (Xinhua, 2022). Forum ini juga menjadi tempat menyampaikan proposal investasi baru serta mendiskusikan hambatan logistik, insentif, dan isu non-tarif yang dihadapi oleh investor Tiongkok.

Selain forum bilateral, peran perwakilan diplomatik Indonesia di Tiongkok menjadi tulang punggung dalam menjaga kesinambungan komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah. KBRI Beijing dan KJRI Guangzhou secara aktif menggelar pameran investasi, forum dagang, serta menyebarkan materi promosi proyek strategis nasional. Kehadiran Atase Perdagangan dan Atase Investasi membantu calon investor dalam memahami iklim bisnis di Indonesia serta menjembatani dialog dengan instansi seperti BKPM, Kemenperin, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Fungsi ini menjadi sangat penting dalam membangun kepercayaan dan menurunkan persepsi risiko yang sering menjadi kendala dalam investasi lintas negara.

Strategi *networking* juga terlihat dari upaya pemerintah daerah dan pengelola KITB dalam membentuk kanal komunikasi langsung dengan

perwakilan perusahaan Tiongkok. Mereka aktif dalam menyelenggarakan *business forum* dan kunjungan lapangan, serta memfasilitasi proses administratif agar berjalan cepat dan transparan. Jejaring yang dibangun tidak hanya bersifat vertikal dari pusat ke daerah, tetapi juga horizontal antarpelaku industri dan lembaga keuangan. Hal ini mempercepat proses peninjauan hingga realisasi investasi, serta mendorong kolaborasi jangka panjang yang berbasis saling percaya.

Dengan ekosistem kelembagaan yang saling terhubung dan forum diplomatik yang aktif, strategi *networking* menciptakan struktur kerja sama yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Peran forum seperti JCBC dan HDCM membuktikan bahwa investasi asing bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga hasil dari proses diplomasi yang intensif dan berlapis. Dalam konteks hubungan Indonesia–Tiongkok, strategi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra ekonomi yang kredibel dan proaktif.

### ***Image Building: Membangun Citra KITB sebagai Kawasan Industri Ramah Lingkungan dan Kompetitif***

Pembangunan citra atau *image building* merupakan tahap penting dalam strategi diplomasi ekonomi karena persepsi investor terhadap suatu negara atau kawasan sangat menentukan minat dan keputusan investasi. Dalam konteks Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), pemerintah Indonesia menempatkan upaya pencitraan sebagai bagian strategis dari promosi kawasan industri unggulan. KITB tidak hanya diposisikan sebagai proyek industri berskala besar, tetapi juga sebagai simbol transformasi ekonomi nasional yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia ingin menunjukkan bahwa investasi di KITB adalah bentuk partisipasi dalam agenda pembangunan jangka panjang yang berwawasan lingkungan.

Pemerintah Indonesia secara konsisten menyampaikan narasi KITB sebagai “*Eco-Industrial Park*” yang dirancang untuk memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Branding ini disampaikan melalui

berbagai platform, mulai dari publikasi resmi oleh Kementerian Investasi/BKPM, promosi oleh Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di Tiongkok, hingga presentasi dalam forum-forum internasional seperti China-ASEAN Expo dan China International Fair for Investment and Trade. Dalam setiap promosi, ditekankan bahwa KITB didukung oleh infrastruktur modern, akses logistik yang efisien, dan sistem perizinan yang transparan dan terintegrasi.

Di tingkat lokal, komitmen pemerintah daerah juga memainkan peran penting dalam memperkuat citra KITB sebagai kawasan yang ramah lingkungan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Batang telah menyusun berbagai kebijakan pendukung, termasuk peraturan tentang pengelolaan limbah industri, penyediaan ruang terbuka hijau, serta pemanfaatan energi dari sumber terbarukan. Selain itu, pengelola kawasan juga diwajibkan memenuhi indikator *green building*, efisiensi energi, dan audit lingkungan berkala. Upaya ini memperkuat persepsi bahwa KITB bukan hanya ramah investor, tetapi juga bertanggung jawab secara ekologis.

Upaya pencitraan juga melibatkan kerja sama dengan media nasional dan internasional untuk membangun narasi positif tentang KITB. Beberapa media Tiongkok, seperti *China Daily* dan *Global Times*, menyebut KITB sebagai *emerging investment destination* yang sejalan dengan prinsip pembangunan hijau dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI). Publikasi-publikasi tersebut menggarisbawahi bahwa KITB merupakan kawasan industri masa depan yang dapat memberikan *return* investasi yang kompetitif sambil tetap menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan. Citra positif ini menjadi aset strategis dalam kompetisi antarnegara untuk menarik modal global.

Pencitraan KITB sebagai kawasan industri hijau dan kompetitif telah berhasil meningkatkan kepercayaan investor. Beberapa perusahaan asal Tiongkok secara eksplisit menyebut bahwa salah satu alasan utama mereka memilih KITB adalah karena keberpihakan kawasan terhadap keberlanjutan

dan efisiensi logistik (Delanova et al., 2018). Strategi *image building* yang dirancang secara konsisten dan profesional terbukti mampu membedakan KITB dari kawasan industri lain di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa pencitraan bukan hanya pelengkap dari strategi diplomasi ekonomi, melainkan pilar utama dalam membangun reputasi investasi jangka panjang.

### **Regulation Management: Reformasi Regulasi dan Harmonisasi Kebijakan Investasi**

Tahapan keempat dan terakhir dalam strategi diplomasi ekonomi menurut Kishan S. Rana adalah *regulation management*, yakni pengelolaan regulasi untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan kompetitif. Dalam konteks Indonesia, hal ini direspons melalui disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) yang menandai era baru dalam penyederhanaan birokrasi dan harmonisasi kebijakan investasi. Regulasi ini bertujuan untuk mempercepat perizinan, mengurangi hambatan struktural, serta menciptakan iklim usaha yang lebih ramah terhadap investasi asing, termasuk di KITB.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memperkenalkan sistem Online Single Submission – Risk-Based Approach (OSS-RBA) yang memungkinkan seluruh proses perizinan, dari tingkat pusat hingga daerah, dilakukan melalui satu pintu berbasis digital. Sistem ini memberikan kemudahan bagi investor asing, khususnya dari Tiongkok, untuk mengakses izin usaha, izin lingkungan, dan berbagai persetujuan teknis dalam waktu yang lebih singkat dan transparan. OSS-RBA juga mengelompokkan risiko kegiatan usaha, sehingga semakin mempermudah pengurusan izin sesuai karakteristik usaha yang dijalankan (Kementerian Investasi/BKPM, 2023).

Selain reformasi di tingkat pusat, harmonisasi kebijakan juga dilakukan di tingkat daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Batang secara aktif menyesuaikan peraturan daerah agar sejalan dengan norma yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Contohnya, Pemkab Batang menerbitkan peraturan tentang zona industri, tata ruang, dan

penyesuaian tarif pajak daerah untuk mendukung masuknya investasi strategis. Hal ini menunjukkan bahwa strategi reformasi tidak bersifat top-down semata, tetapi melibatkan koordinasi dan partisipasi aktif di level lokal untuk memastikan ekosistem investasi yang terintegrasi.

Tidak hanya itu, reformasi regulasi juga mencakup insentif fiskal dan non-fiskal. Investor yang menanamkan modal di KITB memperoleh sejumlah kemudahan seperti tax holiday, tax allowance, bebas bea masuk impor bahan baku, serta kemudahan dalam proses pertanahan dan tenaga kerja. Insentif ini menjadi daya tarik tambahan, terutama bagi investor dari Tiongkok yang mencari lokasi ekspansi yang efisien dan ekonomis. Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi untuk menyelesaikan kendala teknis yang dihadapi investor di lapangan, termasuk soal pertanahan, konektivitas, dan ketenagakerjaan.

Strategi *regulation management* yang komprehensif ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya mempromosikan proyek, tetapi juga menyediakan fondasi hukum dan kelembagaan yang stabil dan progresif. Dengan memastikan bahwa semua aturan mendukung kelancaran investasi, Indonesia memberikan sinyal kuat kepada mitra seperti Tiongkok bahwa pemerintah serius dalam menciptakan ekosistem yang kompetitif secara regional. Dalam jangka panjang, regulasi yang terharmonisasi ini juga berfungsi untuk memperkuat keberlanjutan proyek-proyek strategis seperti KITB agar tidak mudah terpengaruh oleh dinamika politik atau perubahan kebijakan.

### **3. KESIMPULAN**

Strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam mendorong investasi Tiongkok ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) memperlihatkan pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan berlapis. Pemerintah Indonesia memanfaatkan instrumen diplomasi tidak hanya dalam kerangka formal

antarnegara, tetapi juga melalui promosi aktif oleh aktor-aktor tinggi negara, pembangunan jejaring kelembagaan, pencitraan kawasan, hingga reformasi regulasi. Keempat tahapan strategi yang dirumuskan oleh Kishan S. Ranayakni *economic salesmanship*, *networking*, *image building*, dan *regulation management*-terimplementasi secara terpadu dalam konteks KITB, mencerminkan efektivitas diplomasi ekonomi sebagai sarana percepatan pembangunan nasional.

Pada tahap pertama, *economic salesmanship*, peran Presiden Joko Widodo terbukti sentral dalam mempromosikan KITB sebagai kawasan industri unggulan di berbagai forum bilateral dan multilateral. Dukungan dari kementerian teknis dan lembaga investasi juga memperkuat promosi ini sehingga menghasilkan komitmen investasi konkret dari perusahaan-perusahaan Tiongkok. Pendekatan promosi yang dilakukan secara terkoordinasi dari tingkat pusat hingga daerah tidak hanya membangun ketertarikan investor, tetapi juga meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menjanjikan dan siap secara institusional.

Tahap kedua, yaitu *networking*, menunjukkan bahwa keberhasilan diplomasi ekonomi sangat bergantung pada keberadaan forum dan jejaring kelembagaan yang aktif. Forum JCBC dan HDCM menjadi medium penting bagi Indonesia dan Tiongkok untuk membahas agenda-agenda strategis serta menyelesaikan hambatan investasi. Di sisi lain, peran KBRI dan KJRI di Tiongkok sangat penting dalam menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah Indonesia. Kolaborasi lintas lembaga dan keterlibatan diplomatik di semua level menciptakan hubungan yang lebih inklusif dan produktif, serta meningkatkan kepercayaan jangka panjang antar pihak.

Sementara itu, tahapan *image building* memainkan peranan kunci dalam membentuk persepsi positif terhadap KITB. Pemerintah Indonesia berhasil membangun narasi kawasan industri yang ramah lingkungan dan kompetitif secara global. Citra KITB sebagai “eco-industrial park” yang berkomitmen terhadap prinsip keberlanjutan (ESG) telah menjadikannya

lebih menarik di mata investor, khususnya di tengah meningkatnya kesadaran terhadap investasi hijau. Branding ini diperkuat dengan dukungan media nasional dan internasional serta promosi oleh lembaga pemerintah di luar negeri, menjadikan KITB sebagai proyek strategis nasional yang memiliki nilai simbolik dan ekonomi sekaligus.

Terakhir, tahapan *regulation management* menunjukkan bahwa penciptaan iklim investasi yang sehat memerlukan fondasi hukum yang adaptif dan terharmonisasi. Melalui UU Cipta Kerja dan penerapan sistem OSS-RBA, pemerintah telah menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan transparansi administrasi. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan regulasi menjadi bukti komitmen jangka panjang untuk menjaga iklim usaha yang kondusif. Keseluruhan strategi ini membuktikan bahwa diplomasi ekonomi yang berlandaskan institusi dan tata kelola yang baik dapat menjadi alat efektif dalam menarik investasi asing dan mendorong pembangunan kawasan industri strategis seperti KITB.

## **REFERENSI**

Arum, Ajeng Sekar, and Dadan SURYADIPIRA. (2021). "Diplomasi Komersial: Promosi Perdagangan dan Investasi Indonesia terhadap Kenya Pasca KTT Indian Ocean Rim Association (IORA) di Era Presiden Joko Widodo (2015–2019)." *Padjadjaran Journal of International Relations*, vol. 3, no. 2, pp. 277–297.

Delanova, Mariane O., et al. (2018). "Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Penguatan Diplomasi Ekonomi." *Jurnal Dinamika Global*, vol. 2, no. 2, pp. 154–172. <https://doi.org/10.36859/jdg.v2i02.40>.

Dugis, Vinsensio. (2016). "Neoliberalisme." In *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*, edited by V. Dugis, Cakra Studi Global Strategis, pp. 107–124.

Erba, Reyhan. (2024). "Belt and Road Initiative sebagai Gerbang Konektivitas di Asia Tenggara." *Global and Policy Journal of International Relations*, vol. 12, no. 2.

Kementerian Investasi/BKPM. (2024). *Laporan Kinerja Investasi Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BKPM.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah*. 31 Aug. <https://jdih.maritim.go.id/perpres-1062022-percepatan-investasi-melalui-pengembangan-kawasan-industri-terpadu-batang-di-provinsi-jawa-tengah>.

Lamy, Steven L. (2011). "Contemporary Mainstream Approaches: Neo-Realism and Neo-Liberalism." In *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, edited by John Baylis, Patricia Owens, and Steve Smith, 5th ed., Oxford UP, pp. 121–129.

Rana, Kishan S. (2011). *21st-Century Diplomacy: A Practitioner's Guide*. Bloomsbury Publishing USA.

Rivai, Aspin N., et al. (2023). "Ambisi Ekspansi Bisnis dan Politik Strategis Cina di Asia Tenggara melalui Belt Road Initiative: Tinjauan Diplomasi Infrastruktur." *Review of International Relations*, vol. 4, no. 2, pp. 188–219. <https://doi.org/10.24252/rir.v4i2.35041>.

Setiawan, Sakina Rakhma Diah. (2024). "KIT Batang Sambut 2 Perusahaan China, Nilai Investasi Rp 900 Miliar." *Kompas.com*, 18 Nov. <https://money.kompas.com/read/2024/11/18/163328826/kit-batang-sambut-2-perusahaan-china-nilai-investasi-rp-900-miliar?page=all>.

Tempo. (2023). "Investor Cina Wanxinda Group Investasi Rp 1 Triliun di Kawasan Industri Terpadu Batang." *Tempo*, 11 Dec. <https://www.tempo.co/ekonomi/investor-cina-wanxinda-group-investasi-rp-1-triliun-di-kawasan-industri-terpadu-batang-117974>.

Xinhua. (2022). "Wang Yi Co-hosts 2nd Meeting of China–Indonesia High-Level Dialogue Cooperation Mechanism in Indonesia." *Xinhua*, 10 July. <https://english.news.cn/20220710/ee180742ed534ca99e9a6a58259135a3/c.html>.